



Pengaruh Pengelolaan Persediaan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Lisnawati¹, Hapzi Ali, Rudin M³, Tirtana A⁴, Suhaimi RA⁵

¹Mahasiswa Fakultas Manajemen, Universitas Terbuka, email: lisnatirtana@gmail.com

²Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara, email: hapzi.ali@gmail.com

³Mahasiswa Fakultas Manajemen, Universitas Terbuka, email: rudinm@gmail.com

⁴Mahasiswa Fakultas Manajemen, Universitas Terbuka, email: tirtanaa@gmail.com

⁵Mahasiswa Fakultas Manajemen, Universitas Terbuka, email: suhaimira@gmail.com

Corresponding author: Lisnawati¹

Abstrak: Pengaruh pengelolaan persediaan, Penatausahaan barang milik negara dan penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) terhadap kualitas laporan keuangan merupakan karya tulis dalam bidang manajemen keuangan. **Tujuan** tulisan ini yaitu menyusun hipotesis dampak hubungan antar variabel yang akan dipakai untuk penelitian berikutnya. **Objek riset** pada pustaka online, *Google Scholar*, *Mendeley* dan media online akademik lainnya. **Metode riset dengan library research** bersumber dari *e-book* dan *open access e-journal*. **Analisis** deskriptif kualitatif. **Hasil** artikel ini: 1) Pengelolaan persediaan berdampak pada kualitas laporan keuangan; 2) Penatausahaan barang milik negara berdampak pada kualitas laporan keuangan; dan 3) penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Keyword: kualitas laporan keuangan, pengelolaan persediaan, Penatausahaan barang milik negara, penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi.

Abstract: *The effect of inventory management, administration of state property and the use of agency-level financial application systems (SAKTI) on the quality of financial statements is a scientific article of literature study within the scope of financial management. The purpose of this article is to build hypotheses of influence between variables that will be used in further research. The object of research on online libraries, Google Scholar, Mendeley and other academic online media. Research methods with library research sourced from e-books and open access e-journals. Qualitative descriptive analysis. The results of this article: 1) inventory management affects the quality of financial statements; 2) Administration of state property affects the quality of financial statements; and 3) the application of the agency-level financial application system affects the quality of financial statements.*

Keyword: *quality of financial statements, inventory management, state property administration, implementation of agency-level financial application systems*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Uji coba Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi telah dilakukan pada tahun 2016 untuk Direktorat Jenderal Keuangan. Implementasi aplikasi SAKTI didukung oleh PMK 233 pada tahun 2016. Dalam penerapan sistem baru dalam rangka pengelolaan keuangan negara, terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntansi yang menggunakan aplikasi SAIBA-SIMAK BMN dengan akuntansi yang menggunakan aplikasi SAKTI. Sistem Akuntansi Badan Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen (SIMAK BMN) adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk mendukung sistem pelaporan keuangan.

Meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah membutuhkan komitmen terhadap standar yang tinggi dalam penyusunan, pengawasan, dan pelaporan informasi keuangan. Hal ini penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik. Kualitas laporan keuangan instansi pemerintah sangat penting karena laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan gambaran yang akurat dan transparan tentang keadaan keuangan suatu negara atau entitas pemerintah. Dalam upaya pencarian data empiris, banyak peneliti dan author yang mengalami keterbatasan mencari referensi tulisan pendukung untuk karya tulisnya untuk menjadi penelitian sebelumnya atau sebagai penelitian yang sesuai. Artikel yang paling sesuai di butuhkan untuk menguatkan hipotesis yang diambil, untuk melihat keterkaitan atau hubungan antar variabel dan menyusun kerangka hipotesis. Tulisan ini memaparkan keterkaitan pengelolaan persediaan, Penatausahaan barang milik negara, dan penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi terhadap kualitas laporan keuangan, suatu studi pustaka review dalam bidang manajemen keuangan

Berdasarkan latar belakang maka **tujuan penulisan** artikel ini adalah membangun hipotesis untuk penelitian dan sebagai referensi pustaka selanjutnya, yaitu untuk merumuskan: 1) Pengaruh pengelolaan persediaan terhadap kualitas laporan keuangan; 2) Pengaruh penatausahaan barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan; dan 3) Pengaruh penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi terhadap kualitas laporan keuangan;

METODE

Metode penulisan pada penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif, deskriptif dan kajian Pustaka, yang sumber data utamanya yaitu melalui aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley* dan aplikasi akademik online lainnya.

Pada riset kualitatif, studi literature harus dipakai dengan konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. sehingga harus digunakan secara induktif dan tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. hal utama yang harus disadari dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwasannya penelitian kualitatif sifatnya eksploratif, (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan metode, maka hasil artikel ini adalah sebagai berikut:

kualitas laporan keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas menjadi penggambaran struktur posisi keuangan yang disebabkan oleh kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan utama nya yaitu tersedianya informasi

untuk kepentingan penentuan kebijakan dan mempraktekkan akuntabilitas organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah peraturan yang mengatur standar akuntansi yang harus diterapkan oleh entitas pemerintah di Indonesia. Dalam peraturan ini, kualitas laporan keuangan diatur untuk memastikan bahwa laporan keuangan instansi pemerintah memenuhi kriteria tertentu. Laporan keuangan perlu memenuhi karakteristik kualitatif yang dimaksudkan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (Bastian, 2010)

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi dalam 1 siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dalam jangka waktu tertentu. (Sugiono, 2016)

Kualitas laporan keuangan instansi pemerintah memiliki beberapa dimensi, indikator, sintesis, dan faktor penyebabnya. Berikut adalah beberapa faktor yang berdampak pada kualitas laporan keuangan instansi pemerintah:

a. **Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (Government Accounting Standards)**

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mengikuti dan menerapkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku di negaranya. Contohnya, di banyak negara terdapat standar seperti IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) atau standar akuntansi pemerintah lokal yang harus diikuti.

b. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Laporan keuangan pemerintah harus transparan dan memungkinkan publik untuk memahami pengeluaran, penerimaan, serta alokasi anggaran secara jelas. Tingkat akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan dana publik tercermin dalam transparansi laporan keuangan.

c. **Keterandalan dan Keterjaminan Informasi (Reliability and Assurance)**

Kualitas laporan keuangan pemerintah terkait dengan keandalan informasi yang disajikan. Proses audit dan jaminan atas keandalan informasi keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap laporan tersebut.

d. **Pengelolaan Anggaran yang Efektif**

Pengelolaan anggaran pemerintah yang efektif dan efisien akan tercermin dalam laporan keuangan. Faktor-faktor seperti kontrol yang kuat terhadap pengeluaran, pengawasan terhadap pendapatan, serta strategi pengelolaan utang juga berperan dalam kualitas laporan keuangan.

e. **Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan**

Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sejauh mana instansi pemerintah mematuhi hukum, peraturan, dan regulasi yang berlaku dalam konteks keuangan publik.

f. **Pengawasan baik internal maupun eksternal**

Pengawasan ini seperti internal audit dan/atau audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independent sangat penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Peningkatan mutu dari laporan keuangan instansi pemerintah telah banyak di jadikan objek penelitian oleh author terdahulu (Katolik et al., n.d.), (Reza Aditya & Surjono, 2017), (I et al., 2021)

Pengelolaan barang milik negara

Pengelolaan BMN merupakan tindakan yang mencakup inventarisasi, pembukuan dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan PMK 181/PMK.06/2016.

Pengelolaan aset negara sejalan dengan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui penataan aset BMN yang baik diharapkan dapat tercapai efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Tata Kelola yang baik adalah pemerintah menghasilkan laporan keuangan

yang berkualitas tinggi dan terintegrasi yang dapat mencerminkan gambaran sebenarnya, data yang diperoleh dari APBN atau sumber lain harus transparan dan harus disajikan secara akuntabel. Hal ini diatur dalam peraturan keuangan negara. (Amiri, 2016)

Pengelolaan Penatausahaan barang milik negara di instansi pemerintah melibatkan sejumlah dimensi, indikator, sintesis, atau faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat memengaruhi pengelolaan Penatausahaan barang milik negara di instansi pemerintah:

a. **Kepatuhan Hukum dan Regulasi**

Instansi pemerintah harus mematuhi aturan, hukum, dan regulasi yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pemeliharaan. Ini termasuk kebijakan pengelolaan aset, prosedur pengadaan, dan penggunaan dana publik.

b. **Akuntabilitas dan Transparansi**

Pengelolaan Penatausahaan barang milik negara harus transparan agar masyarakat dapat memahami bagaimana aset publik dikelola dan digunakan. Akuntabilitas yang jelas terhadap aset negara juga menjadi kunci dalam pengelolaan yang efektif.

c. **Pengelolaan Risiko**

Pengelolaan risiko berkaitan dengan kepemilikan, seperti risiko kerusakan, kehilangan, atau penggunaan yang tidak efisien, perlu menjadi fokus dalam pengelolaan Penatausahaan barang milik negara. Hal ini mencakup strategi mitigasi risiko yang tepat.

d. **Pemantauan dan Pengawasan**

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan, pemeliharaan, dan pergerakan penting untuk mencegah kerugian atau penyalahgunaan.

e. **Penilaian Aset**

Penilaian yang akurat terhadap penting untuk menetapkan nilai awal, memelihara data nilai aktual, dan mengidentifikasi perubahan nilai seiring waktu.

f. **Pemeliharaan dan Perawatan**

Pemeliharaan yang baik dan perawatan teratur atas diperlukan agar tetap dalam kondisi yang baik dan memiliki umur manfaat yang panjang.

g. **Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi**

Penggunaan teknologi informasi yang canggih dan sistem manajemen aset yang terintegrasi sehingga penatausahaan dapat menjadi lebih efisien dan akurat.

h. **Auditing dan Pengendalian Intern**

Proses audit dan pengendalian intern yang kuat akan membantu memastikan bahwa pengelolaan BMN di instansi pemerintah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

i. **Efektivitas Penggunaan Aset**

Aset milik negara harus digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan yang diamankan, tanpa adanya pemborosan atau penggunaan yang tidak tepat.

j. **Kinerja Aset**

Evaluasi terhadap kinerja aset milik negara diperlukan untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Penatausahaan barang milik negara ini sudah banyak di teliti oleh author terdahulu di antaranya adalah (Wawasan dan Riset Akuntansi et al., n.d.), (Razak & Nasution, 2022), (Gubali et al., 2018)

Pengelolaan Persediaan

Pengelolaan persediaan yaitu inventarisasi barang dan sumberdaya yang dipakai oleh perusahaan untuk melaksanakan tindakan produksi dan operasional. Umumnya pada saat-saat tertentu, pengelolaan aset milik negara menjadi aset terbesar di neraca dan sulit diubah atau

diubah menjadi uang tunai. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menjaga tingkat kendali mereka atas aset milik negara serendah mungkin. (Jacos dan Chase, 2016)

Pengelolaan persediaan merupakan sebuah istilah yang menunjukkan sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan (Handoko, 2008) Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan persediaan antara lain:

a. **Kepatuhan Terhadap Regulasi**

Pengelolaan persediaan harus diatur sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan regulasi yang berlaku terkait pengadaan, penyimpanan, dan penggunaan.

b. **Akuntabilitas dan Transparansi**

Instansi pemerintah harus bertanggung jawab secara jelas atas persediaan. Transparansi dalam penggunaan dan persediaan menjadi penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana persediaan tersebut dikelola.

c. **Manajemen Risiko**

Pengelolaan risiko terkait persediaan, seperti risiko keusangan, kerusakan, atau kehilangan, harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan persediaan.

d. **Pemantauan dan Pengawasan**

Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan persediaan, termasuk pemantauan terhadap jumlah, kualitas, dan penggunaannya, penting untuk mencegah pemborosan atau penyalahgunaan.

e. **Pengadaan yang Efisien**

Proses pengadaan persediaan yang efisien, termasuk pemilihan vendor, negosiasi harga yang baik, dan pemenuhan kebutuhan secara tepat waktu, penting untuk mengelola dengan biaya yang optimal.

f. **Pemeliharaan dan Penyimpanan yang Tepat**

Pengelolaan persediaan harus dipelihara dengan baik dan disimpan dengan benar agar terhindar dari kerusakan, pencurian, atau kehilangan.

g. **Teknologi dan Sistem Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dan sistem manajemen yang terintegrasi dapat membantu dalam pengelolaan Perusahaan barang milik negara dengan lebih efisien, termasuk pemantauan stok, pengadaan, dan penggunaan persediaan.

h. **Audit dan Pengendalian Intern**

Proses audit dan pengendalian intern yang kuat akan membantu memastikan bahwa pengelolaan persediaan pemerintah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

i. **Perencanaan dan Peramalan**

Perencanaan yang baik terkait kebutuhan persediaan serta peramalan yang akurat akan membantu instansi pemerintah dalam mengelola dengan lebih efektif.

j. **Efisiensi Penggunaan**

Pengelolaan persediaan harus digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tanpa adanya pemborosan atau penggunaan yang tidak tepat.

Faktor-faktor ini bersama-sama mempengaruhi pengelolaan persediaan, di mana transparansi, pengawasan yang baik, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya menjadi kunci dalam pengelolaan yang baik.

Pengelolaan persediaan ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Suhandono & Hidayat, n.d.), (Aditya et al., 2020), (Hendri & Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, 2020)

Penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021, sistem aplikasi keuangan tingkat lembaga merupakan aplikasi yang memusatkan perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan tanggung jawab APBN kepada pemerintah. Pengguna SAKTI merupakan perwakilan lembaga yang mempunyai tugas seperti 16 operator yang masing-masing tugasnya dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kurun waktu tersebut, pengurus bertugas mengimplementasikan fitur-fitur teknis SAKTI. Sistem dapat digunakan secara elektronik oleh banyak pengguna, termasuk BUN yang telah menerapkan sistem multi-user dan database terpusat. Pelaksanaan SAKTI sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Hak Akses dan KPA. SAKTI terdiri dari sembilan modul yang terintegrasi sesuai fungsinya masing-masing, yaitu: Modul Penatausahaan, Modul Kewajiban, Modul Pembayaran, Modul Penganggaran, Modul Aktiva Tetap, Modul Pengelolaan Barang Milik Negara, Modul Piutang, Modul Keuangan, Modul Akuntansi dan Pelaporan. Penggunaan modul ini juga mencakup pengelolaan transaksi dan pemantauan SAKTI. Salah satu penerapan SAKTI dalam penyusunan LKBUN adalah dengan mengirimkan data dari SAKTI ke SPAN dan mengunggah data konfigurasi satuan kerja ke KPPN..

Penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi ini merupakan topik menarik yang sudah banyak diamati dan dipelajari fenomenanya oleh para ahli di antaranya adalah (Amriani & Iskandar, 2019), (Andansari, Ekowani ,2022), (Fitriawati, 2021)

Hasil Review Artikel Relevan

Melakukan kajian artikel yang sesuai tema penelitian ini sebagai dasar dalam menentukan hipotesis penelitian dengan menjabarkan hasil riset yang pernah dilaksanakan, menerangkan kesesuaian dan perbedaan dengan rencana penelitiannya, dari penelitian terdahulu yang sesuai seperti tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Hasil Penelitian Relevan

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
(Wawasan dan Riset Akuntansi et al., n.d.)	Pengaruh penatausahaan barang milik negara dan penerapan sistem informasi manajemen barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan	Pembukan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN	Penerapan pengelolaan aset nasional dan SIMAK BMN secara simultan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
(Razak & Nasution, 2022)	Analisis Efektifitas Penatausahaan Barang Milik Negara melalui aplikasi SIMAK BMN	Pembukan, inventarisasi BMN dan pelaporan	Penatausahaan BMN dengan aplikasi SIMAK-BMN telah sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku
(Gubali et al., 2018)	Analisis penatausahaan Barang Milik Negara melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN	Pembukuan, laporan SIMAK BMN	Pengelolaan Penatausahaan barang milik negara memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
(Hendri & Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, 2020)	Penerapan PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan pada kantor inspektorat Kab Bantaeng	Penerapan akuntansi persediaan	Penerapan akuntansi persediaan di kantor inspektorat kab bantaeng telah sesuai dengan standar yang berlaku
(Aditya et al., 2020)	Pengelolaan persediaan pada aplikasi SAKTI menggunakan algoritma FIFO	Pengeolaan persediaan, SAKTI, FIFO	Pengelolaan barang persediaan menggunakan sakti dengan menggunakan algoritma FIFO dapat membantu untuk dapat mengoptimalkan belanja dan pemakaian persediaan
(Suhandono & Hidayat, n.d.)	Sistem informasi pengelolaan barang persediaan milik negara di pusat Penilaian pendidikan	Sistem informasi, pengelolaan barang persediaan milik negara	Aplikasi pengelolaan persediaan dapat mempermudah dalam pelaporan dan pemakaian persediaan
(Amriani & Iskandar, 2019)	Analisis kesuksesan implementasi SAKTI pada satuan kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan	Aplikasi SAKTI, Implementasi	Implementasi aplikasi sakti terbukti secara empiris belum berjalan sukses dan berhasil berdasarkan seluruh indicator atau pendekatan model kesuksesan DeLone dan McLean.
(Anwar, A.I., & Hadi.M., 2022)	Implementasi aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan	Laporan keuangan, SAKTI, SPAN	Laporan keuangan dengan SAKTI sudah di lakukan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan.

Pembahasan

Berdasarkan sumber-sumber studi ilmiah yang telah ada maka pembahasan artikel *literature review ini* adalah melakukan review artikel yang paling sesuai, analisis pengaruh antar variabel dan menyusun pola fikir rencana penelitian:

Pengaruh penatausahaan barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan.

kualitas laporan keuangan dapat sangat dipengaruhi oleh bagaimana penatausahaan barang milik negara dilakukan. Upaya yang baik dalam pengelolaan dan pencatatan aset pemerintah dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan informasi dalam laporan keuangan, pengelolaan asset milik negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2004. Pasal 49(6) bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diatur dengan peraturan negara. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah. Hal ini menjadi dasar bagi kementerian dan pemerintah daerah untuk mengelola wilayah tersebut. Seiring berjalannya pembangunan, pengelolaan wilayah menjadi semakin kompleks dan perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

adalah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip pengelolaan barang milik negara atau daerah, termasuk prosedur pengadaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pertanggungjawaban atas barang milik negara atau daerah. Inventarisasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dan mencatat serta melaporkan hasil pengumpulan data. Doli D Siregar mendefinisikan inventaris aset mempunyai dua kegiatan: inventarisasi fisik dan inventaris legal. Aspek fisik meliputi bentuk, luas, letak, volume, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek hukum meliputi status kepemilikan, aspek hukum kepemilikan, dan batas kepemilikan akhir.

Prinsip-prinsip ini menjadi panduan utama dalam penatausahaan barang milik negara, memastikan pengelolaan aset pemerintah dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Penatausahaan asset milik negara berdampak signifikan kepada kualitas laporan keuangan, jika pengelolaan Penatausahaan asset milik negara dipersepsikan dengan baik maka kualitas laporan keuangan akan digambarkan baik pula begitu juga sebaliknya. Bahwasannya jika penatausahaan assets milik negara masih belum teratur maka laporan keuangan yang tersaji tidak akurat dan relevan.

Tujuan inventarisasi adalah untuk menyimpan seluruh data BMN untuk menjamin ketertiban administratif dan fisik serta memudahkan pengelolaan BMN. Menetapkan nomor dan nama ruangan pada denah lokasi, mencatat hasil inventaris pada buku kerja inventaris, mengelompokkan dan memberi kode barang sesuai Klasifikasi dan Pengkodean Barang, mengedit log hasil inventaris (BAHI), laporan hasil inventaris Melakukan pengelolaan inventaris seperti penyerahan barang. Memperbarui hasil inventaris.

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan tetap memperhatikan pengelolaan dan pengoperasian aset milik negara, otoritas perlu berkoordinasi dengan KPPN. Hal ini untuk memastikan bahwa semua transaksi/peristiwa yang mempengaruhi nilai dicatat. Klasifikasi, penyajian dan pengungkapan dalam laporan. Item hak pengguna relevan dan sesuai untuk membuat laporan dengan hak yang relevan, andal, sebanding, dan dapat dimengerti. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi perlu dilakukan secara berkala pada setiap tingkat pelaporan, dimulai dengan koordinasi internal pada tingkat otoritas pengguna real estat dan koordinasi eksternal antara otoritas pengguna real estat dan pengelola real estat. Pengelolaan Penatausahaan barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Razak & Nasution, 2022), (Katolik et al., n.d.), (Gubali et al., 2018) .

Pengaruh Pengelolaan persediaan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengelolaan persediaan pada instansi pemerintah adalah proses pengaturan dan pengawasan terhadap barang atau komoditas yang dimiliki oleh pemerintah untuk digunakan dalam menjalankan operasi dan layanan publik. Pengelolaan persediaan pada instansi pemerintah melibatkan serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang yang diperlukan dalam menjalankan operasional dan layanan publik secara efisien dan efektif. Hal ini juga membutuhkan pemantauan yang cermat terhadap stok barang serta peningkatan dalam penggunaan dan pengelolaan persediaan secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip atau konsep-konsep ini menjadi pedoman dalam mengatur dan menjalankan pengelolaan persediaan di instansi pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat mengelola Penatausahaan barang milik negara dengan lebih baik, lebih efisien, dan lebih akuntabel. Pengelolaan persediaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, jika Pengelolaan persediaan dilaksanakan dengan baik maka kualitas laporan keuangan akan diwujudkan dengan baik pula, begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan persediaan yang baik akan menghasilkan laporan persediaan, sehingga laporan keuangan menjadi akuntabel, relevan, efektif dan efisien.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pengelolaan persediaan adalah Pengelolaan persediaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memengaruhi tingkat, jenis, dan manajemen pengelolaan persediaan. Faktor-faktor ini bersama-sama mempengaruhi Pengelolaan persediaan, dan penting untuk mempertimbangkan dan mengelola aspek-aspek ini secara efektif untuk memastikan Pengelolaan persediaan dapat memenuhi kebutuhan layanan publik dengan tepat

Pengelolaan persediaan berperan terhadap kualitas laporan keuangan, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Suhandono & Hidayat, n.d.), (Aditya et al., 2020)

Pengaruh penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan pengganti/replika dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK BMN). Perbedaan SAKTI dengan permohonan Satker sebelumnya antara lain:

- a. Menggunakan database pusat.
- b. Arsip Data Komputer (ADK)
- c. Kemudahan dalam penginstalan pada beberapa sistem operasi (Windows, Linux, dll).
- d. Tutorial yang relatif mudah (ramah pengguna);
- e. Dapat dijalankan dengan kebutuhan minimum PC/Laptop.
- f. F. Performa aplikasi lebih konsisten.

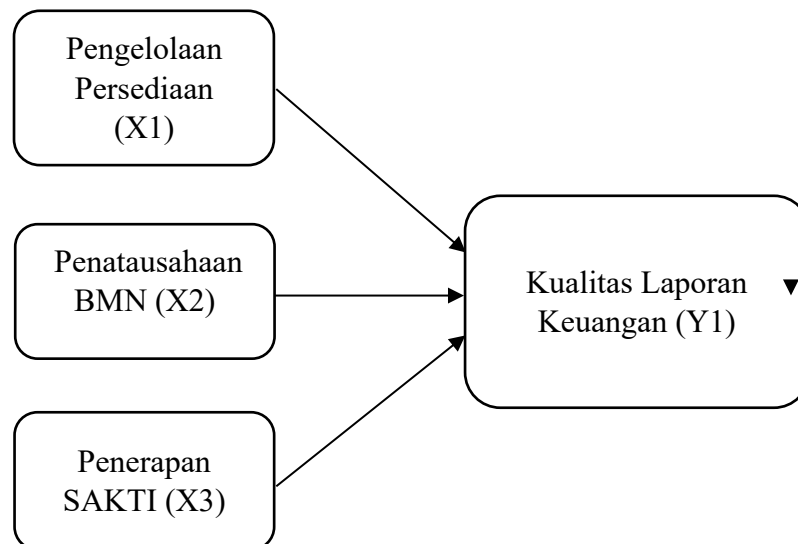
SAKTI telah menggunakan sistem single point entry, database tunggal, dan akuntansi akrual. Periode perdagangan SAKTI meliputi bulan Januari sampai dengan Desember, tidak diaudit (periode 13) dan diaudit (periode 14). Sistem penyampaian keuangan tingkat lembaga (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan pemerintah SATKER, mulai dari proses penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan. Setiap proses pengelolaan keuangan tercakup dalam modul aplikasi berikut:

- a. Proses penganggaran dilakukan oleh modul penganggaran.
- b. Proses implementasi akan dilakukan melalui beberapa modul, yaitu: Modul Komitmen (termasuk sub modul manajemen pemasok dan manajemen komitmen), Modul Akuntansi, Modul Aktiva Tetap, Modul Pengelolaan Barang Milik Negara, Modul Pembayaran.
- c. Proses pelaporan dilakukan oleh GL dan modul pelaporan.

Penggunaan SAKTI berdampak pada kualitas laporan keuangan. Jika penerapan sistem penyampaian keuangan di tingkat instansi dipersepsikan baik maka kualitas laporan keuangan juga akan dipersepsikan baik, begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat dijelaskan dengan diperkenalkannya sistem aplikasi keuangan di tingkat Instansi untuk menggantikan aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi (SIMAK BMN). Dengan menggunakan aplikasi ini, otoritas dapat dengan mudah membuat inventarisasi dan memastikan inventarisasi tersebut tercatat dengan Penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berperan terhadap kualitas laporan keuangan, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Andansari dan Ekowani ,2022), (Fitriawati, 2021)

Kerangka konseptual Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka di peroleh rerangka konseptual artikel sebagai berikut.



Gambar 1: Rerangka Konseptual

Berdasarkan konsep gambar yang telah dijelaskan sebelumnya, maka: pengelolaan Penatausahaan asset milik negara, Penatausahaan barang milik negara, dan penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi memiliki pengaruh pada tingkatan predikat laporan keuangan. variabel lain yang juga memiliki pengaruh, adalah:

- 1) x4: Click or tap here to enter text. , (Novansa & Ali, 1926), dan (Ali et al., 2016),
- 2) x5: (Ali et al., 2018), (Sitio & Ali, 2019), dan (Ali et al., 2022),
- 3) penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi:(Aditya et al., 2020), (Razak & Nasution, 2022)

KESIMPULAN

Jika kita tarik benang merah berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan artikel ini yaitu untuk merumuskan hipotesis bagi penelitian dan studi literature selanjutnya, yaitu: 1) pengelolaan persediaan berdampak pada kualitas laporan keuangan; 2) Penatausahaan barang milik negara berdampak pada kualitas laporan keuangan. dan 2) penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berdampak pada kualitas laporan keuangan.

REFERENSI

- Aditya, H., Ardiansyah, M., Gata, W., Nusa Mandiri Jl Kramat Raya Nomor, S., Senen, K., & Jakarta Pusat, K. (2020). PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA APLIKASI SAKTI MENGGUNAKAN ALGORITMA FIRST IN FIRST OUT (FIFO). In *Jurnal Informatika* (Vol. 20, Issue 2).
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi. In *In Deeppublish: Yogyakarta*.
- Ali, H., Evi, N., & Nurmahdi, A. (2018). The Influence of Service Quality, Brand Image and Promotion on Purchase Decision at MCU Eka Hospital. *Business and Management Studies*. <https://doi.org/10.21276/sjbms.2018.3.1.12>
- Ali, H., Limakrisna, N., & Jamaluddin, S. (2016). Model of customer satisfaction: The empirical study at Bri in Jambi. *International Journal of Applied Business and Economic Research*.
- Ali, H., Zainal, V. R., & Ilhamalimy, R. R. (2022). Determination of Purchase Decisions and Customer Satisfaction: Analysis of Brand Image and Service Quality (Review Literature of Marketing Management). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 3(1), 141–153. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v3i1.1100>
- Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan. *Jurnal Informatika*, 1(2), 32-55.

- Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 54–74.
<https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.409>
- Gubali, M., Tinangon, J., Pusung, R., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2018). ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SIMAK-BMN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MINAHASA. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 13, Issue 3).
- Hendri, W., & Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, S. (2020). *PENERAPAN PSAP 05 TENTANG AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA KANTOR INSPEKTORAT KAB. BANTAENG* (Vol. 01, Issue 01).
- I, D. H., Rebecka, S. D., & Yanti, H. B. (2021). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 227–244.
<https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9402>
- Katolik, U., Medan, S. T., & Ekonomi, F. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH NOVI NATALIA PADANG SE.,M.SI Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA)*.
- Novansa, H., & Ali, H. (1926). Purchase Decision Model: Analysis of Brand Image, Brand Awareness and Price (Case Study SMECO Indonesia SME products). *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.21276/sjhss>
- Razak, N., & Nasution, J. (2022). Analisis Efektivitas Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Aplikasi SIMAK-BMN. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(2), 39–41. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i2.177>
- Reza Aditya, O., & Surjono, W. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *SIKAP*, 2(1), 49–62.
<http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Sitio, T., & Ali, H. (2019). Patient Satisfaction Model and Patient Loyalty: Analysis of Service Quality and Facility (Case Study at Rawamangun Special Surgery Hospital). *Scholars Bulletin*. <https://doi.org/10.36348/sb.2019.v05i10.002>
- Suhandono, E., & Hidayat, D. A. (n.d.). SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN MILIK NEGARA DI PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN Information System for State Inventory Management at Education Assessment Center. *Jl Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan*, 2(1).
- Wawasan dan Riset Akuntansi, J., Handayani Amaliah, T., Pratiwi Husain, S., & Wayan Selvianti, N. (n.d.). *PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN*.